

INFRASTRUKTUR PAUD DI INDONESIA: ANTARA STANDAR IDEAL DAN REALITA LAPANGAN

Yuli Salis Hijriyani

UIN Ponorogo

Email: hijriyani@iainponorogo.ac.id

Yoga Aditia Ragil

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: yogaaditiragil@umj.ac.id

Fitria Budi Utami

Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin

Email : fitriabudiutami.2005@gmail.com

Abstrak: Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan standar nasional terkait sarana dan prasarana untuk PAUD, namun pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan, terutama di daerah dengan keterbatasan geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi infrastruktur lembaga PAUD di Kabupaten Subang, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya yang dilakukan dalam memenuhi standar ideal. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari guru PAUD dan perwakilan dinas pendidikan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur seperti minimnya ruang kelas layak, sanitasi, dan area bermain masih menjadi persoalan utama. Tantangan tersebut diperparah oleh keterbatasan anggaran, letak geografis yang sulit dijangkau, serta belum optimalnya dukungan lintas sektor. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih kontekstual, kolaboratif lintas sektoral dan penguatan dukungan infrastruktur untuk mewujudkan PAUD yang inklusif dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci: infrastruktur PAUD, geografis PAUD, layanan PAUD

Abstract: The government has established various policies and national standards related to facilities and infrastructure for PAUD, but implementation in the field still shows significant gaps, especially in areas with geographical limitations. This study aims to assess the infrastructure condition of PAUD institutions in Subang District, as well as identify challenges and efforts made in meeting ideal standards. The method used is a qualitative case study with data collection through interviews, observation, and documentation. Participants in this study consisted of PAUD teachers and representatives of the local education office. The results show that infrastructure limitations such as lack of proper classrooms, sanitation and play areas are still a major issue. These challenges are exacerbated by budget constraints, difficult geographical locations, and suboptimal cross-sector support. The findings confirm the importance of more contextualized policies, cross-sectoral collaboration and strengthened infrastructure support to realize inclusive and quality ECD in all regions of Indonesia.

Key words: ECD infrastructure, ECD geography, ECD services

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam kerangka pembangunan nasional, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai hak dasar setiap warga negara, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini menandakan bahwa pendidikan bukan hanya sebuah layanan, tetapi hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir¹. Salah satu jenjang pendidikan yang sangat krusial namun kerap terabaikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

PAUD memegang peranan strategis dalam membentuk dasar karakter, kecerdasan, dan kesiapan belajar anak di masa mendatang. *The theory of early childhood as a golden age and early childhood education as an investment is the basis for increased government attention to early childhood education*². Periode usia dini dikenal sebagai masa emas (*golden age*) dalam perkembangan anak, di mana rangsangan yang tepat akan berpengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang fisik, kognitif, emosional, dan sosial mereka. Oleh karena itu, keberadaan lembaga PAUD yang berkualitas menjadi suatu keniscayaan.

Seiring dengan kesadaran akan pentingnya PAUD, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan, seperti program “1 Desa 1 PAUD” dan penerapan PAUD Holistik-Integratif (PAUD HI), yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Pada Permendikbud nomor 18 tahun 2018 pada pasal 6 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu)

¹ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang*, 105 129–133 (1945).

² Ida Rahmawati, “The Golden Generation 2045 and Early Childhood Education: Between Idealism and Economic Reality,” *Policy Futures in Education* 0, no. 229 (2025): 1–7.

desa/kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD³. Selanjutnya pada Perpres No. 60 Tahun 2013 menjelaskan bahwa PAUD Holistik Integratif sebagai upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak secara simultan, sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi⁴. Kedua kebijakan ini menunjukkan komitmen negara dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan PAUD. Namun demikian implementasi di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius, terutama terkait keberadaan dan kondisi infrastruktur lembaga PAUD.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah menetapkan sarana dan prasarana sebagai salah satu indikator mutu pendidikan, namun realitas di lapangan sering kali jauh dari harapan. Sesuai dengan hasil penelitian dari Rokhmah dijelaskan bahwa Di beberapa sekolah dasar di Indonesia masih ditemukan kondisi ruang kelas yang tidak layak dan sudah tua⁵. Permasalahan ini menjadi penting karena beberapa jenjang pendidikan pun juga mengalami masalah prasarana, tidak terkecuali pada jenjang PAUD. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Fitria yang menjelaskan bahwa tantangan keterbatasan lahan di PAUD Anna Husada untuk lapangan *outdoor* sehingga sekolah memanfaatkan ruangan sekolah meskipun ruangan tersebut tidak didesain untuk kegiatan fisik⁶. Nabila mengidentifikasi bahwa terdapat lembaga PAUD dimana terlihat bahwa anak-anak memiliki ruang gerak yang terbatas, sarana yang dimiliki

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini," *Kemdikbud*, no. 654 (2018): 1–9, www.peraturan.go.id.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 60, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif*, 2013.

⁵ Al-madrasah Jurnal Ilmiah and Pendidikan Madrasah, "Problematisa Prasarana Penunjang Pendidikan Sekolah Dasar Di Indonesia," *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 9, no. 2 (2025): 974–991.

⁶ Anis Fitria, Dias Putri Yuniar, and Fajar Luqman Tri Ariyanto, "Analisis Manajemen Sarana Prasarana Di Lembaga PAUD Anna Husada Bangkalan," *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 11, no. 1 (2024): 75–83.

belumsepenuhnya maksimal⁷. Kondisi ini menjadi cerminan adanya kesenjangan antara standar ideal yang ditetapkan dalam kebijakan, dengan realita yang dihadapi oleh lembaga PAUD, terutama di daerah dengan keterbatasan geografis dan ekonomi.

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, wilayah terpencil, daerah perbukitan, hingga kawasan pesisir, menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Jaenal menjelaskan bahwa pemahaman yang rendah, infrastruktur yang minim, absennya sinergi lintas sektor menjadi permasalahan yang perlu dilihat, sehingga perlu diperkaya dengan indikator kesiapan kelembagaan dalam perlindungan anak, bukan hanya dari sisi fisik atau administratif⁸. Khumalo menjelaskan *The availability of supporting infrastructure as crucial in ensuring that the learning and teaching context functions maximally*⁹. Di banyak daerah, terutama di wilayah timur Indonesia dan desa-desa terpencil, lembaga PAUD masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana. Tidak sedikit PAUD yang menumpang di rumah warga, tidak memiliki toilet, kekurangan ruang bermain, atau tidak memiliki akses air bersih dan ventilasi yang memadai. Bahkan, akses menuju PAUD itu sendiri sering kali sulit dijangkau karena tidak tersedianya sarana transportasi atau infrastruktur jalan.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan PAUD perlu diperhatikan infrastruktur maupun sarana dan prasarananya. Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan yang

⁷ Nabila Hasliadi and Rani Puspa Juwita, "Analisis Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Taman Kanak-Kanak," *Aulad: Journal on Early Childhood* 7, no. 2 (2024): 27.

⁸ Agus Jaenal, "PERLINDUNGAN ANAK USIA DINI: STUDI KASUS KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG DI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA," *Jurnal Tahsinia* 5, no. 6 (2024): 902–911.

⁹ Bongani Khumalo and Andile Mji, "Exploring Educators' Perceptions of the Impact of Poor Infrastructure on Learning and Teaching in Rural South African Schools," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5, no. 20 (2014): 1521–1532.

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran¹⁰. Untuk memastikan kedua hal tersebut berjalan dengan lancar perlu adanya upaya mutu untuk diperhatikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan manajemen sarana prasarana pendidikan anak usia dini meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan¹¹. Upaya mutu ini juga menjadi perhatian untuk dapatkan guru yang memiliki kualitas yang memadai.

Kondisi yang kurang, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi sarpras membuat lembaga PAUD tidak bisa berbuat banyak dalam pemilihan guru. Sehingga berdirinya PAUD hanya sebatas memenuhi syarat lembaga di masing-masing wilayah dan kurang memperhatikan kualitas guru. Mayoritas guru tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang PAUD atau bidang terkait yang relevan¹². Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian dari Erdiyanti yang menjelaskan bahwa kualifikasi pendidikan sebagian besar guru PAUD masih tamatan SMA dan sarjana non PG-PAUD¹³. Tempat mengajar yang tidak layak merupakan salah satu faktor yang tidak mendukung kinerja guru¹⁴. Sekali pun lembaga telah berdiri namun sarpras dan infrastruktur tidak diperhatikan, maka yang terjadi adalah minimnya peserta didik yang masuk dalam lembaga tersebut. Sehingga pemasukan akan relatif kecil dan membuat gaji guru kurang. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian dari Ningsih yang menjelaskan bahwa gaji mereka seringkali tidak mencerminkan tingkat tanggung jawab

¹⁰ Ai Robihatil Milah et al., "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Mendukung Proses Pembelajaran," *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 529–534.

¹¹ Wahyu Purwasih and Ahmad Sahnun, "Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Dasar Melalui Manajemen Sarana Dan Prasarana," *Madako Elementary School* 1, no. 2 (2022): 99–117.

¹² Aji Nur Shofiah and Charis Munandar, "Dilema Linieritas Dan Kualifikasi Akademik: Meningkatkan Profesionalisme Guru PAUD," *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2023): 374–386.

¹³ Erdiyanti and Suhartini Syukri, "Peningkatan Kompetensi Guru PAUD Non Pg-PAUD Melalui Pendampingan Pembuatan Media Pembelajaran Di Kecamatan Konda," *MURHUM : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2021): 68–79.

¹⁴ Faridah Alawiyah, "Problematisasi Tata Kelola Guru Dalam Implementasi Undang-Undang Guru Dan Dosen," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 9, no. 1 (2018): 121–143.

dan upaya yang guru lakukan¹⁵. Sehingga masalah ini menjadi masalah besar yang perlu dikaji secara mendalam.

Mengingat pentingnya peran infrastruktur dalam menunjang mutu layanan PAUD, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam persoalan infrastruktur lembaga PAUD di Indonesia melalui pendekatan studi kasus. Fokus utama akan diarahkan pada bagaimana infrastruktur yang tersedia memengaruhi pelaksanaan layanan PAUD dan sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. *Case study methodology serves to provide a framework for evaluation and analysis of complex issues*¹⁶. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam dan holistik tentang kondisi infrastruktur lembaga PAUD dalam konteks yang nyata dan kompleks, khususnya di daerah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya seperti Kabupaten Subang, Jawa Barat. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk hubungan antara kebijakan, kondisi fisik lembaga, serta persepsi dan pengalaman para pelaku pendidikan. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari salah satu guru dan satu dari Dinas Pendidikan setempat. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Instrumen penelitian

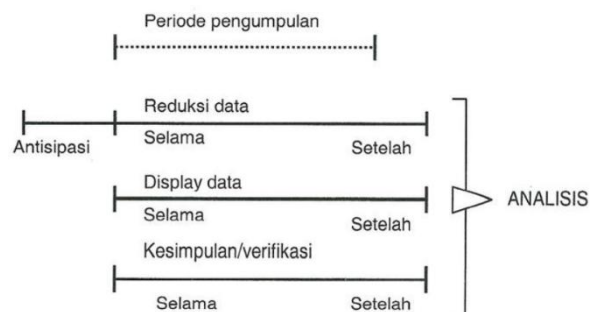
Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara	Partisipan
Bagaimana kondisi infrastruktur fisik lembaga	1. Bagaimana kondisi bangunan dan ruang kelas yang digunakan di PAUD ini?	Guru PAUD

¹⁵ Rahmi Wardah Ningsih et al., "KESENJANGAN HAK DAN KEWAJIBAN GURU PAUD DENGAN GURU NON PAUD," *Jurnal Sentra Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2023).

¹⁶ Roberta Heale and Alison Twycross, "What Is a Case Study?," *Evidence-Based Nursing* 21, no. 1 (2018): 7–8.

PAUD di wilayah pedesaan Subang?	2. Apakah tersedia sarana dasar seperti toilet anak, air bersih, ventilasi, dan pencahayaan? 3. Apakah anak-anak memiliki area bermain yang memadai dan aman?	
Apa saja tantangan yang dihadapi lembaga PAUD dalam memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai ketentuan nasional?	1. Apa kendala utama dalam memenuhi standar sarana-prasarana PAUD menurut peraturan yang berlaku? 2. Apakah keterbatasan dana menjadi faktor yang signifikan dalam pengadaan infrastruktur? 3. Bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap pembangunan atau perbaikan fasilitas PAUD ini?	Dinas Pendidikan
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengelola PAUD dan pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur tersebut?	1. Apa strategi atau inisiatif yang pernah dilakukan oleh pihak PAUD untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur? 2. Apakah ada bantuan dari pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat dalam pengadaan sarana prasarana? 3. Bagaimana peran dinas pendidikan atau pengawas PAUD dalam mendukung pengembangan fasilitas di lembaga ini?	Dinas Pendidikan

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi seperti foto-foto dan dokumen pendukung lainnya. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengkodean (*coding*), penyajian data, serta verifikasi data. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* ¹⁷.



Gambar 1. Komponen dalam analisis data (flow model)

¹⁷ Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2011.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Infrastruktur Fisik Lembaga PAUD

Hasil observasi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur PAUD yang menjadi lokasi studi masih jauh dari standar ideal yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal tersebut sesuai dengan hasil data temuan yakni kelas multifungsi yang juga digunakan untuk kegiatan bermain, makan, dan istirahat. Ruang kelas memiliki pencahayaan yang terbatas dan ada ventilasi terbuka namun kondisinya jarang dibersihkan, sehingga sirkulasi udara kurang optimal.

Air bersih bersumber dari sumur bor yang tidak selalu aktif, terutama saat musim kemarau. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari seorang guru bahwa fasilitas dasar seperti toilet anak tersedia, namun kondisinya tidak memadai tidak ada sistem pembilasan air dan tidak tersedia wastafel untuk mencuci tangan. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil observasi yang memperlihatkan bagaimana kondisi yang ada pada lembaga tersebut:



Gambar 1. Kondisi sanitasi yang tidak memadai

Lembaga tersebut memiliki sedikit area bermain *outdoor* yang dapat digunakan sebagai aktifitas fisik. Namun dikarenakan kondisi sekolah juga berada pada lingkungan seperti tempat tambang pasir yang tidak adanya tempat bermain, maka area tersebut terkadang digunakan juga oleh warga sekitar. Hal tersebut sesuai data temuan terdapat Area bermain anak

berada di halaman sempit dengan permukaan tanah keras dan minim alat permainan edukatif (APE).

Letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan membuat monitoring dan pendampingan dari dinas pendidikan tidak dapat dilakukan secara berkala. Hal tersebut selaras dengan temuan data di lapangan bahwa pelaksanaan visitasi jarang dilakukan, bila dilakukan pun lebih fokus pada aspek administratif, bukan fisik. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan teknis sarana-prasarana PAUD dan realitas di lapangan, khususnya di wilayah pedesaan yang mengalami keterbatasan sumber daya.

Tantangan dalam Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana PAUD

Secara geografis wilayah di Indonesia masih banyak yang sulit dijangkau. Letak yang lembaga PAUD yang jauh dari pusat layanan publik menyebabkan hambatan dalam memenuhi kebijakan 1 Desa 1 PAUD, hal ini juga menyulitkan dalam pelaksanaan PAUD Holistik-Integratif yang menuntut keterhubungan dengan sektor kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Layanan pendidikan sudah hadir, namun permasalahan lain muncul ketika lembaga sulit untuk mendapatkan beberapa akses layanan contohnya kesehatan. Jarak tempuh ke akses layanan tersebut sekitar 7 kilometer, jadi apabila anak sakit atau ada program gizi mereka tidak cepat merespons karena terkendala jarak tempuh yang cukup jauh.

Meski secara administrasi program 1 Desa 1 PAUD telah tercapai, banyak peserta didik yang masih saja belum bisa bersekolah karena jarak antara rumah dan lembaga terlalu jauh. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya moda transportasi yang ramah anak. Hal tersebut peneliti temukan terdapat anak usia 3-4 tahun belum bisa jalan sejauh kurang lebih 7 kilometer sedangkan orang tuanya juga harus berangkat kerja.

Beberapa daerah mengandalkan model TK satu atap yang digabung dengan jenjang lainnya. Meskipun model ini memperluas akses, namun kenyatannya tidak memenuhi standar pedagogis dan fasilitas yang sesuai bagi anak usia dini. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“ruangannya sama dengan ruang kelas anak SD, bahkan guru-gurunya juga kadang diambil dari guru SD (CWDP1., KI9). Padahal, PAUD butuh pendekatan berbeda. Apalagi untuk kegiatan bermain, ruangannya tidak mendukung (CWDP1., KI10)”

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil observasi sebagai berikut:



Gambar 2. Kondisi lingkungan lembaga

Keterbatasan anggaran menjadi persoalan paling dominan. PAUD yang berada di bawah pengelolaan desa seringkali tidak memiliki anggaran rutin khusus untuk pembangunan atau perawatan fasilitas. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“bantuan dari pemerintah daerah atau pusat sangat bergantung pada proposal, namun tidak semua pengelola PAUD memiliki kapasitas untuk menyusunnya dengan baik (CWDP1., KI11)”

Terdapat kesenjangan pemahaman antara kebijakan yang tertulis dengan kondisi realitas. Banyak pengelola PAUD yang tidak memahami secara menyeluruh standar teknis infrastruktur PAUD. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Hal tersebut berdampak pada kesalahan prioritas penggunaan dana operasional, misalnya lebih fokus pada pembelian alat tulis ketimbang memperbaiki toilet atau ventilasi ruang kelas (CWDP1., KI11)”

Temuan ini memperlihatkan bahwa keterbatasan infrastruktur PAUD bukan semata soal fisik dan dana, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor struktural, geografis, dan kelembagaan.

Upaya Mengatasi Keterbatasan Infrastruktur

Sebagian wilayah dengan kondisi geografis sulit tidak mampu menjamin akses infrastruktur yang lengkap. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi dinas pendidikan, salah satunya berupa bantuan seragam. Seragam dianggap sebagai bentuk simbolik untuk memotivasi anak untuk tetap bersekolah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“harapannya kalau anak sudah merasa punya seragam sekolah, semangatnya muncul meski harus jalan jauh (CWDP1., KI14)”

Dalam menghadapi keterbatasan sistemik, beberapa pihak dinas telah melakukan koordinasi dengan kabupaten atau kecamatan lain untuk berbagi praktik baik. Koordinasi ini tidak hanya menjadi ajang tukar informasi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi lintas wilayah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami ikut forum kepala PAUD tingkat kabupaten (CWDP1., KI15). Di situ kami bisa tahu bahwa di kecamatan lain, mereka kerja sama dengan koperasi desa untuk bangun area bermain (CWDP1., KI16). Nah, dari situ kami coba komunikasi dengan pihak desa juga. Jadi memang saling belajar (CWDP1., KI17)”

Salah satu kendala umum dalam perbaikan layanan PAUD adalah tidak adanya anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

jujur tahun ini kami tidak ada anggaran untuk monitoring khusus PAUD (CWDP1., KI18). Tapi tahun depan, kami sudah usulkan agar ada post khusus untuk Monev PAUD (CWDP1., KI19).

Ketika lembaga formal sulit dijangkau, masyarakat dan pengelola PAUD berupaya mencari solusi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di desa, seperti PKBM atau rumah warga yang dipinjam secara

sukarela. Langkah ini memperlihatkan semangat kolaborasi masyarakat dalam menjamin layanan pendidikan untuk anak-anak. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Di dusun kami, anak-anak kesulitan akses ke gedung PAUD induk (CWDP1., KI21). Jadi kami minta izin ke tokoh masyarakat untuk pakai ruangan PKBM yang kosong tiap pagi (CWDP1., KI22). Bahkan ada satu warga yang ikhlas pinjamkan garasi rumahnya seminggu sekali untuk kelas anak usia dini (CWDP1., KI23)”

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa meski belum sistemik, ada kesadaran dan inovasi lokal yang tumbuh dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur PAUD. Dengan penguatan sinergi, dukungan kebijakan kontekstual, dan optimalisasi potensi lokal, PAUD di wilayah tertinggal dapat terus bertahan dan berkembang.

PEMBAHASAN

Kondisi Infrastruktur Fisik Lembaga PAUD

Realitas di berbagai lembaga PAUD di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara standar ideal sarana prasarana yang ditetapkan pemerintah dan kondisi faktual di lapangan. Meskipun Permendikbud No. 137 Tahun 2014 telah menetapkan standar nasional PAUD, termasuk ketentuan ruang kelas, sanitasi, ruang bermain, serta alat permainan edukatif, namun banyak lembaga PAUD terutama yang bersifat nonformal dan swadaya masyarakat masih beroperasi dengan infrastruktur yang jauh dari layak.

Banyak lembaga PAUD yang menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar di ruangan serbaguna, bekas rumah tinggal, bahkan teras masjid atau posyandu, yang sejatinya tidak dirancang sebagai ruang pendidikan anak usia dini. Ruang kelas sempit, ventilasi yang kurang baik, serta tidak adanya sekat pembatas antar sudut kegiatan menyebabkan anak kesulitan dalam fokus belajar dan tidak mendapat lingkungan yang kondusif untuk eksplorasi.

Kondisi lahan yang terbatas seringkali membuat lembaga tidak memiliki ruang terbuka untuk bermain. Padahal, menurut teori

perkembangan motorik Gallahue dan Ozmun (2022), kegiatan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan memanjat merupakan kebutuhan dasar anak usia 3–6 tahun. Namun kenyataannya, banyak PAUD yang tidak memiliki halaman, apalagi alat permainan luar ruang.

Dari sisi sanitasi, masih ditemukan PAUD yang menggunakan satu toilet umum untuk guru dan anak, tanpa menyesuaikan ketinggian kloset, wastafel, dan tidak adanya air bersih mengalir secara konsisten. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip *child-friendly environment* yang seharusnya menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kemandirian anak sebagai prioritas utama. Perabot yang digunakan pun sering kali merupakan hasil donasi barang bekas, seperti meja yang terlalu tinggi, kursi berat dari kayu jati, atau lemari besi yang berisiko menciderai anak. Tidak adanya rak terbuka yang mudah dijangkau anak menghambat penerapan prinsip kemandirian dalam pendidikan anak usia dini sebagaimana diajarkan dalam pendekatan Montessori.

Dari perspektif keamanan, sebagian lembaga PAUD tidak memiliki pagar keliling yang kokoh atau sistem penguncian gerbang. Kondisi ini rawan terhadap risiko anak keluar tanpa pengawasan atau gangguan dari luar. Belum lagi persoalan kabel listrik terbuka, lantai licin, atau langit-langit yang sudah lapuk menjadi bahaya nyata yang mengintai. Pencahayaan alami juga menjadi masalah umum. Banyak ruang kelas PAUD yang hanya menggunakan lampu neon dan minim ventilasi udara, menciptakan suasana yang lembab dan kurang sehat. Padahal menurut standar, ruang belajar anak seharusnya memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara alami yang cukup untuk mendukung kesehatan fisik dan konsentrasi belajar.

Ketiadaan alat permainan edukatif yang bervariasi turut menjadi cerminan lemahnya infrastruktur. Anak usia dini membutuhkan alat permainan yang dapat menstimulasi berbagai aspek perkembangan (kognitif, sosial, motorik, bahasa), namun kenyataannya mereka hanya memiliki boneka bekas, balok tidak lengkap, atau bahkan mainan rusak yang tidak diperbarui. Meskipun pengelola PAUD memiliki niat baik dan

dedikasi yang tinggi, keterbatasan dana dan minimnya pendampingan teknis membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan. Bahkan beberapa pengelola merasa sudah cukup apabila anak hadir, bermain, dan tidak menangis. Kesadaran akan pentingnya desain lingkungan belajar yang sesuai tahap perkembangan masih menjadi tantangan besar.

Realita ini harus diakui sebagai cerminan dari kondisi sosial-ekonomi dan kurangnya prioritas kebijakan terhadap pendidikan anak usia dini. Infrastruktur yang kurang ideal bukan semata soal fisik, tetapi menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan awal yang layak belum sepenuhnya terpenuhi secara merata.

Tantangan dalam Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana PAUD

Meskipun regulasi telah menetapkan standar yang jelas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua lembaga PAUD mampu memenuhi sarana dan prasarana secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran. Banyak PAUD di wilayah pedesaan atau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) bergantung pada swadaya masyarakat dan belum mendapatkan dukungan dana operasional yang memadai. Keterbatasan lahan menjadi kendala lainnya. Lembaga PAUD yang berada di kawasan padat penduduk sering kali tidak memiliki halaman bermain terbuka atau ruang tambahan untuk kegiatan motorik kasar anak. Hal ini menghambat penerapan kurikulum yang berbasis pengalaman nyata (*experiential learning*). Kurangnya pemahaman pengelola tentang standar infrastruktur juga menjadi tantangan. Beberapa penyelenggara PAUD tidak mengetahui bahwa standar nasional mengharuskan tinggi toilet disesuaikan dengan tinggi anak, penggunaan cat dinding non-toksik, dan pencahayaan alami yang cukup.

Permasalahan lainnya muncul dari minimnya supervisi teknis dari instansi terkait. Banyak lembaga yang belum pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan teknis mengenai desain ruang PAUD yang ideal, sehingga renovasi atau pembangunan dilakukan tanpa

memperhatikan kebutuhan tumbuh-kembang anak. Di sisi lain, kebijakan pendidikan yang berubah-ubah juga menimbulkan kebingungan di level implementasi. Beberapa lembaga ragu untuk berinvestasi dalam pembangunan fisik karena tidak ada jaminan keberlanjutan program. Hal ini diperparah dengan minimnya sinergi antar instansi, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Bappeda.

Tantangan juga muncul dalam konteks inklusivitas. PAUD yang ingin menerima anak dengan kebutuhan khusus membutuhkan penyesuaian fisik yang tidak sedikit, seperti jalur landai, ruang sensorik, atau alat bantu. Tanpa dukungan dana dan pelatihan, kebutuhan ini sering terabaikan. Tidak semua guru atau pendidik memahami pentingnya keterkaitan antara infrastruktur dengan proses belajar anak. Padahal, teori konstruktivis seperti milik Piaget menekankan bahwa anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungannya. Jika lingkungan fisik minim stimulasi, maka proses konstruksi pengetahuan menjadi terbatas.

Kesadaran masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Banyak orang tua belum menganggap penting kualitas infrastruktur PAUD selama ada guru dan kurikulum. Padahal, keamanan dan kenyamanan anak tidak bisa dipisahkan dari faktor fisik lembaga. Terakhir, tantangan juga berasal dari keberagaman tipologi PAUD di Indonesia (formal, nonformal, informal) yang masing-masing memiliki tingkat kesiapan infrastruktur berbeda. Maka, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak seragam, melainkan berbasis kebutuhan dan konteks lokal.

Upaya Mengatasi Keterbatasan Infrastruktur

Untuk menjawab tantangan infrastruktur PAUD, pendekatan strategis yang multi-level dan kolaboratif diperlukan. Upaya pertama yang sangat penting adalah advokasi kebijakan dan anggaran. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang proporsional untuk pengembangan fisik PAUD, tidak hanya pada sektor

pendidikan dasar. Kedua, sinergi antara masyarakat, yayasan, dunia usaha, dan organisasi sosial perlu dikembangkan. Pendekatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan sekitar dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan fisik atau pengadaan alat bermain yang aman dan edukatif.

Pelatihan dan sosialisasi kepada pengelola dan guru PAUD mengenai pentingnya infrastruktur yang ramah anak sangat dibutuhkan. Pemahaman yang baik akan standar dan desain akan membantu lembaga menyusun perencanaan pengembangan secara bertahap dan tepat sasaran. Penggunaan desain sederhana dan lokal bisa menjadi solusi ekonomis. Banyak lembaga berhasil membangun taman bermain dari bahan bekas seperti ban, kayu lokal, atau paralon dengan memperhatikan prinsip keamanan dan estetika. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini sesuai dengan prinsip PAUD yang kontekstual. Pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi dapat menjalin kemitraan melalui program pengabdian masyarakat, di mana dosen dan mahasiswa jurusan arsitektur atau teknik sipil dapat merancang ruang PAUD yang hemat biaya namun optimal secara fungsi dan keamanan.

Penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) Lembaga PAUD sebaiknya memasukkan aspek penguatan infrastruktur fisik sebagai prioritas. Dengan tahapan target yang jelas, lembaga dapat menggalang dana dan mengukur capaian infrastruktur setiap tahunnya. Selain itu, digitalisasi perencanaan melalui pelatihan pengelola PAUD untuk menggunakan tools desain sederhana (misalnya SketchUp, Canva, atau Google Form untuk pemetaan kebutuhan) akan mempermudah pengajuan proposal bantuan infrastruktur kepada instansi pemerintah atau donatur. Mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dalam pengembangan infrastruktur juga penting.

Penggunaan bahan bangunan yang aman, pencahayaan alami, ventilasi silang, dan ruang terbuka hijau tidak hanya hemat energi, tetapi mendukung tumbuh kembang anak. Untuk anak berkebutuhan khusus, dukungan dari Dinas Sosial dan LSM perlu diintensifkan. Pendekatan *universal design for learning* (UDL) dapat menjadi acuan dalam merancang lingkungan fisik yang inklusif dan fleksibel untuk seluruh anak. Akhirnya, keberhasilan mengatasi keterbatasan infrastruktur bergantung pada komitmen kepemimpinan dan kolaborasi. Kepala lembaga PAUD yang visioner dan terbuka terhadap inovasi akan lebih mudah menggandeng berbagai pihak dalam membangun lingkungan belajar yang layak dan berkualitas bagi anak usia dini.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketimpangan infrastruktur lembaga PAUD di wilayah pedesaan Subang sebagai cerminan realita yang juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Meskipun secara kebijakan telah ditetapkan standar sarana dan prasarana yang ideal, dalam praktiknya pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak keterbatasan, terutama akibat faktor geografis, keterbatasan dana, serta lemahnya sinergi lintas sektor. Studi ini menegaskan bahwa ada jarak yang cukup besar antara norma yang tertulis dan kondisi faktual, yang jika tidak diatasi secara serius akan berdampak pada kualitas layanan pendidikan anak usia dini, termasuk aspek perlindungan dan pengembangan holistik anak.

Secara keseluruhan, artikel ini berupaya mendorong pembaca terutama pemangku kebijakan dan praktisi PAUD untuk melihat kembali urgensi pembangunan infrastruktur sebagai bagian integral dari layanan pendidikan anak usia dini. Tidak cukup hanya dengan membuka akses kuantitatif lewat program “1 Desa 1 PAUD”, tetapi juga harus disertai komitmen terhadap kualitas. Pendidikan anak usia dini yang bermutu hanya dapat terwujud jika didukung oleh lingkungan fisik yang aman, sehat, dan

ramah anak. Dengan demikian, PAUD dapat menjadi ruang tumbuh yang layak bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali.

Untuk menjembatani kesenjangan antara standar kebijakan dan praktik di lapangan, perlu adanya pendekatan yang lebih kontekstual dan kolaboratif dalam pembangunan infrastruktur PAUD. Pemerintah, pengelola lembaga, serta masyarakat perlu membangun mekanisme komunikasi dan sinergi yang berkelanjutan, serta mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada. Khusus di wilayah dengan kondisi geografis sulit, strategi adaptif dan fleksibel perlu dipertimbangkan agar kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar operasional di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Faridah. "Problematika Tata Kelola Guru Dalam Implementasi Undang-Undang Guru Dan Dosen." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 9, no. 1 (2018): 121–143.
- Erdiyanti, and Suhartini Syukri. "Peningkatan Kompetensi Guru PAUD Non Pg-PAUD Melalui Pendampingan Pembuatan Media Pembelajaran Di Kecamatan Konda." *MURHUM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2021): 68–79.
- Fitria, Anis, Dias Putri Yuniar, and Fajar Luqman Tri Ariyanto. "Analisis Manajemen Sarana Prasarana Di Lembaga PAUD Anna Husada Bangkalan." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 11, no. 1 (2024): 75–83.
- Hasliadi, Nabila, and Rani Puspa Juwita. "Analisis Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Taman Kanak-Kanak." *Aulad: Journal on Early Childhood* 7, no. 2 (2024): 27.
- Heale, Roberta, and Alison Twycross. "What Is a Case Study?" *Evidence-Based Nursing* 21, no. 1 (2018): 7–8.
- Ilmiah, Al-madrasah Jurnal, and Pendidikan Madrasah. "Problematika Prasarana Penunjang Pendidikan Sekolah Dasar Di Indonesia." *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 9, no. 2 (2025): 974–991.
- Jaenal, Agus. "Perlindungan Anak Usia Dini: Studi Kasus Kebijakan Undang-Undang Di Lembaga Pendidikan Anak Usia." *Jurnal Tahsinia* 5, no. 6 (2024): 902–911.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini." *Kemdikbud*, no. 654 (2018): 1–9. www.peraturan.go.id.
- Khumalo, Bongani, and Andile Mji. "Exploring Educators' Perceptions of the Impact of Poor Infrastructure on Learning and Teaching in Rural South African Schools." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5, no. 20 (2014): 1521–1532.
- Milah, Ai Robihatil, Tatin Suhertin, Deti Kurnia, Neneng Nurmalasari, Misbahudin, and Fauzan Dhiaulhaq. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Mendukung Proses Pembelajaran." *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 529–534.
- Negera Republik Indonesia. *Undang-Undang*, 105 129–133 (1945).
- Ningsih, Rahmi Wardah, Niken Farida, Hilma Mithalia, and Desa Sidodadi. "Kesenjangan Hak Dan Kewajiban Guru PAUD Dengan Guru Non PAUD." *Jurnal Sentra Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2023).
- Nomor 60, Peraturan Presiden Nomor. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif*, 2013.
- Purwasih, Wahyu, and Ahmad Sahnani. "Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Dasar Melalui Manajemen Sarana Dan Prasarana." *Madako Elementary School* 1, no. 2 (2022): 99–117.
- Rahmawati, Ida. "The Golden Generation 2045 and Early Childhood Education: Between Idealism and Economic Reality." *Policy Futures in Education* 0, no. 229 (2025): 1–7.
- Shofiah, Aji Nur, and Charis Munandar. "Dilema Linieritas Dan Kualifikasi Akademik: Meningkatkan Profesionalisme Guru PAUD." *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2023): 374–386.
- Soegiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2011.